

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era kebebasan pers yang marak dewasa ini membuat media massa saat ini mengalami perkembangan yang amat pesat. Era reformasi memungkinkan adanya kebebasan baik dalam penyampaian informasi lewat media ataupun untuk mendirikan sebuah institusi media. Era reformasi yang diikuti oleh kebijakan deregulasi dalam bidang media dan liberalisasi dalam informasi melalui jaminan kemerdekaan pers dan kebebasan informasi menempatkan masyarakat Indonesia dalam bentara informasi yang beragam pula. Tentu saja apresiasinya membutuhkan perspektif yang luas.

Pertumbuhan dan perkembangan media massa, juga dipengaruhi sektor baik sosial, ekonomi, budaya maupun pemerintahan. Sistem komunikasi di Indonesia yang diwarnai oleh kesenjangan informasi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota ini mengharuskan perencanaan komunikasi yang tepat dengan memperhitungkan penggunaan media yang tepat, pesan yang tepat untuk khalayak sasaran (*target audience*) yang tepat dengan mempertimbangkan pula unsur *cost effectivenessnya* (Depari, 2001: 8)

Akses mayoritas masyarakat Indonesia pada medium informasi sangat terbatas (khususnya media cetak), mengakibatkan berkembangnya kesenjangan informasi (*information gap*) antara mereka yang umumnya disebut sebagai *the media rich* dengan *the media poor*. Bahkan propaganda pembangunan yang berlebihan seringkali menjenuhkan masyarakat. Informasi yang bersifat *top down* berkesan menggurui seolah-olah kota lebih pintar dari

masyarakat pinggiran dan masyarakat desa (Balairung : 2008:51). Itulah sebabnya ruang-ruang publik di kampung-kampung pinggiran ataupun di desa-desa dari arisan, kumpulan warga seperti kelompok tani, rembug kampung atau dukuh, gardu jaga hingga kedai sayur menjadi lalu lintas informasi masyarakat pinggiran dan di desa. Saat ini masyarakat juga dihadapkan pada percepatan informasi dimana ruang-ruang publik yang ada sudah tidak dapat menampung ataupun mewadahi. Karena itulah perlu adanya tambahan media lain yang mampu mengalirkan pemerataan informasi sampai ke daerah-daerah pedesaan. Seperti banyaknya persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat kota Surakarta, yang wilayahnya tersebar di 51 kelurahan.

Dengan wilayah yang cukup luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan lebih dari 65% penduduk tinggal di daerah pinggiran kota, sebagian besar masyarakat kota Surakarta sulit mengakses informasi dari pihak pemerintah kota Surakarta, hal ini yang menyebabkan macetnya komunikasi antara warga masyarakat kota Surakarta dengan Elit Pemerintahan. Kemacetan informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat semakin parah dengan ketidakberdayaan warga untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dari kelompok masyarakat terutama masalah-masalah yang berkembang ditengah-tengah kehidupan.

Belum lagi komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah kota Surakarta banyak menggunakan komunikasi satu arah, atau hanya sebatas penyampaian pesan dari satu pihak yaitu pemerintah kota Surakarta, tanpa adanya *Feed back* (umpan balik) atau respon balik dari masyarakat. Hal ini

kelas kurang mampu mengatasi macetnya arus aspirasi dari kalangan masyarakat. Hal inilah pulalah yang menjadi dasar pemikiran dari pihak pemerintah Kota Surakarta dan beberapa tokoh masyarakat yang peduli terhadap pentingnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan berusaha membuka akses informasi dan aspirasi yang selama ini tersendat.

Tetapi perlu juga diingat bahwa kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat kota Surakarta untuk mengakses informasi masih menjadi salah satu alasan mengapa media massa masih dianggap mahal. Masyarakat yang tingkat ekonominya rendah lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok daripada sekedar untuk membeli koran, misalnya. Akibatnya media massa hanya menjadi konsumsi para elit tertentu saja. Apalagi bila budaya dan kemampuan baca masyarakat terutama di pinggiran masih rendah, karena media massa cetak masih sulit diakses oleh mayoritas warga masyarakat.

Dengan melihat besarnya jumlah penduduk dan pemerataan penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pinggiran kota dengan tingkat ekonomi termasuk kelas menengah kebawah (bahkan tingkat pra-sejahtera), maka pihak pemerintah kota Surakarta memandang perlu adanya program yang bisa mengatasi permasalahan macetnya akses informasi dan aspirasi masyarakat tersebut. Tentunya hal yang tak kalah penting adalah program tersebut disajikan melalui sebuah media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang sebagian besar berkemampuan ekonomi yang rendah.

Program yang dimaksud adalah program komunikasi yang bersifat terbuka, artinya program yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemerintahan.

Dalam hal ini Walikota selaku Kepala Daerah, sehingga masyarakatpun dapat secara langsung menyampaikan aspirasi mereka, sehingga apa yang dinamakan transparansi (keterbukaan) jalannya pemerintahan dapat terwujud.

Perencanaan komunikasi yang dituangkan dalam program sebuah media yang telah disebutkan tadi, tentunya perlu diperhatikan pula pemilihan media yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat kota Surakarta dengan wilayah geografis yang luas dan padat penduduknya itu. Disinilah sebenarnya peran radio dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan informasi, namun tidak memiliki cukup dana untuk mengaksesnya.

Radio dipandang sebagai media yang cukup strategis guna menjangkau *audience* yang menempati ruang geografis yang luas. Masyarakatpun lebih dapat mendengarkan radio karena sebagian besar masyarakat memilikinya, baik di daerah perkotaan ataupun wilayah pinggiran kota bahkan sampai ke wilayah pedesaan. Radio masih menjadi alat komunikasi yang fleksibel, orang bisa mendengarkan berita radio dengan santai bahkan sambil tiduran ataupun sambil mengerjakan sesuatu di rumah atau dilokasi manapun.

Program acara radio yang dimaksud dapat hadir di tengah-tengah masyarakat secara rutin dan sifatnya mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para pejabat pemerintahan, khususnya pemerintah kota Surakarta, atau dengan kata lain mampu menjembatani komunikasi dua arah, Sehingga upaya untuk mewujudkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat terwujud. Harapan masyarakat mengenai transparansi public dapat terwujud.

Pemerintah kota Surakarta dalam mensosialisasikan program-program kerjanya atau masalah-masalah yang berhubungan dengan aspek

pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan dapat diakses melalui siaran radio. Dalam hal ini Radio Republik Indonesia stasiun Surakarta (RRI Surakarta) yang juga bisa dihanting oleh siaran radio swasta. Era reformasi lebih menekankan sebagai lembaga siaran public yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau media komunikasi antar pemerintah kota Surakarta dengan masyarakat.

Program Siaran Srawung Praja RRI Surakarta, sebagai media komunikasi antara pemerintah kota Surakarta dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan program-program pembangunan, nampaknya memiliki eksistensi yang kuat dalam memenuhi fungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah kota Surakarta dengan warga kota Surakarta. Dalam program siaran srawung praja itu, tidak harus walikota saja sebagai nara sumber, tetapi juga kepala-kepala bagian atau lembaga pemerintah bidang tertentu dapat menyampaikan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Siaran Srawung Praja RRI Surakarta secara hukum mempunyai tanggungjawab hukum dalam hal pemberitaan, maupun mekanisme penyiarannya. Tanggungjawab tentunya mempunyai dampak positif karena pelaksanaannya akan berhati-hati untuk menyiarkan dan menyebarkan informasinya. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang tentang penyiaran mengamanatkan bahwa jurnalis merupakan profesi yang dituntut tanggungjawab terhadap apa yang dikemukakan. Sehingga pengelolaan siaran Srawung Praja bukan pihak yang menyiarkan informasi lalu berdampak negatif. Kemudian lari (menghindar) dari tanggungjawab.

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum program siaran srawung praja sebagai siaran publik antara pemerintah kota Surakarta dan masyarakat ?
2. Bagaimana peran Siaran Srawung Praja pada siaran publik RRI Surakarta dalam mengkomunikasikan program Pembangunan Masyarakat di Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui perspektif hukum perspektif hukum program siaran srawung praja sebagai siaran publik antara pemerintah kota Surakarta dan masyarakat.
2. Mengetahui peran Siaran Srawung Praja pada siaran publik RRI Surakarta dalam mengkomunikasikan program Pembangunan Masyarakat di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Berdasar perspektif hukum yang digunakan dapat dikaji efektivitas komunikasi yang dilakukan Pemkot Surakarta dan masyarakat melalui Media Siaran Srawung Praja RRI Surakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian hukum Tata Negara tentang komunikasi antara Pemerintah Kota/Kabupaten Surakarta dengan masyarakat melalui komunikasi radio siaran publik.